

PENGARUH ASPEK-ASPEK DEMOKRASI INDONESIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERIODE 2016-2020

Sabardin^{1,*}, Muhammad Ghafur Wibowo²
ainter75@gmail.com¹, Muhammad.wibowo@uin-suka.ac.id²
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta^{1,2}

ABSTRACT

This research aims to find out how aspects of democracy presented through civil liberties, political rights, and democratic institutions influence Indonesia's economic growth from 2016 to 2020. The Central Statistics Agency (BPS) provided the data and researchers used secondary data for this research from 2016 to 2022. The random effect model (REM) is the model selection test most commonly found in this research approach, which uses panel data regression analysis tools. It was found that variables related to democratic institutions positively and significantly influence economic growth. However, civil liberties and political rights did not affect Indonesia's economic growth from 2016 to 2020.

Keywords: *Economic Growth, Civil Freedom, Political Rights, Democracy Institutions*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek-aspek demokrasi yang dipresentasikan melalui kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 hingga 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data dan peneliti menggunakan data sekunder untuk penelitian ini dari tahun 2016 hingga 2022. *Random effect model* (REM) merupakan uji pemilihan model yang paling banyak ditemukan dalam pendekatan penelitian ini, yang menggunakan alat analisis regresi data panel. Ditemukan bahwa variabel-variabel yang berhubungan dengan lembaga demokrasi secara positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kebebasan sipil dan hak-hak politik tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2016 hingga 2020.

Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, Lembaga Demokrasi*

Pendahuluan

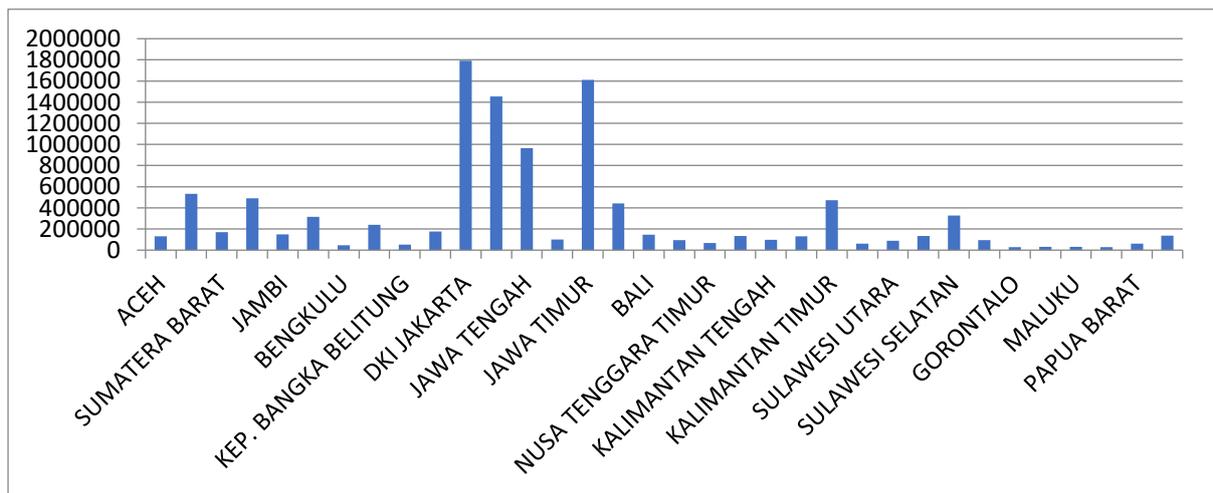
Pertumbuhan ekonomi berarti perekonomian telah melalui proses perbaikan dan mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi (Adib *et al.*, 2019). Menurut Sukirno (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif perkembangan suatu perekonomian pada tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada seberapa besar perubahan perekonomian pada suatu tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan perekonomian suatu negara tercermin dari pertumbuhan ekonominya, yang diukur dari tingkat pertumbuhannya (Yolanda & Satrianto, 2019).

Negara-negara di dunia mendambakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penilaian kinerja perekonomian suatu negara (Mulyadi, 2023). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja suatu perekonomian, terutama untuk menganalisis hasil upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan suatu negara dan wilayah. Pertumbuhan terjadi ketika suatu perekonomian meningkatkan produksi barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada sejauh mana

*Corresponding Author

kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan bagi suatu masyarakat selama periode waktu tertentu. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila seluruh keuntungan riil penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) ketika harga dijaga konstan (Dewi & Sutrisna, 2014). Demokrasi meningkatkan Produk domestik bruto, dengan peningkatan sekitar 20-25 persen dalam 25 tahun setelah transisi menuju demokrasi. Demokratisasi terjadi dalam gelombang regional, dan negara lebih cenderung melakukan transisi ke demokrasi atau non- demokrasi jika hal yang sama terjadi di negara-negara sekitarnya.

Berbeda dengan klaim umum bahwa demokrasi merugikan pertumbuhan ekonomi, bukti dari penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi mendorong PDB yang lebih tinggi melalui reformasi ekonomi, peningkatan kapasitas fiskal, dan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, dampak demokrasi tidak menunjukkan perbedaan signifikan berdasarkan tingkat pendapatan. Terdapat beberapa perbedaan tergantung pada tingkat sumber daya manusia, namun dampak ini tidak cukup besar untuk menyebabkan dampak negatif demokrasi bagi negara-negara dengan sumber daya manusia yang rendah (Acemoglu *et al.*, 2019).



Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi PDRB di berbagai Provinsi di Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan (miliar)

Gambar 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, DKI Jakarta dan Jawa Barat mendominasi PDRB nasional. Pulau Jawa secara keseluruhan memberikan kontribusi yang besar. Pertumbuhan ekonomi terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Bali sebagai pusat pariwisata dengan PDRB yang tinggi. Terdapat kesenjangan ekonomi antara provinsi, dengan provinsi maju seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dibandingkan dengan provinsi berkembang seperti Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo.

Akan tetapi pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi yang signifikan, terutama dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Dampak pandemi Covid-19 di Indonesia mencakup terpengaruhnya kebebasan sipil dan demokrasi. Langkah penanganan pandemi, meski bertujuan baik, menimbulkan pelanggaran hak-hak masyarakat sipil, seperti kekerasan dan intimidasi. Kurangnya dasar hukum yang jelas dalam pembatasan aktivitas

masyarakat dan keberlanjutan darurat sipil menunjukkan potensi runtuhnya demokrasi. Selain itu, pelanggaran prinsip proporsionalitas terjadi dalam penegakan aturan physical distancing, dengan pemidanaan yang tidak proporsional terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Prinsip non-diskriminatif juga dilanggar oleh pemerintah, menyoroti perlunya keseimbangan antara kebijakan penanganan pandemi dan penghormatan terhadap hak-hak individu (Achmad et al., 2020).

Menurut Fatah *et al.* (2012) menemukan bahwa investasi asing langsung dan kebebasan sipil adalah pendorong utama pertumbuhan Tiongkok, sementara angka kelahiran yang tinggi dan meningkatnya keterbukaan adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Indonesia, dan Malaysia. Pendorong utama pertumbuhan bagi Indonesia, menyatakan bahwa hal ini merupakan stimulus yang signifikan terhadap PDB. Di sisi lain, Malaysia lebih baik dalam hal kebebasan politik, dan kebebasan sipil lebih baik dalam hal dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain dilakukan oleh Zouhaier (2012) studi ini menyelidiki dampak hak-hak politik, kebebasan sipil, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menemukan bahwa kebebasan sipil dan investasi mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kebebasan politik secara parsial mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Realisasi demokrasi ekonomi saat ini semakin menjauh dari cita-cita, dimana ketimpangan struktural ekonomi justru semakin meningkat (Mas'ud *et al.*, 2022).

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya terkait dengan indeks demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi yakni Zainuddin *et al.* (2023) hasil studi menunjukkan bahwa Hasil dari analisis ini didapat bahwa kebebasan sipil signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedangkan Yudanto & SBM (2021) hasil studi menunjukkan bahwa Hasil dari analisis ini didapat bahwa kebebasan sipil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam Penelitian Fajri *et al.* (2021) Hak-hak politik merupakan dimensi demokrasi yang mencakup partisipasi dan kompetisi. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed & Ahmad (2020) hasil menunjukkan hak-hak politik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammadi *et al.* (2023) hasil menunjukkan bahwa hak-hak politik tidak mempunyai pengaruh.

Penelitian ini dilakukan kembali karena terdapat kesenjangan diatas dan penelitian ini belum dilakukan untuk kurun waktu 2016-2020 dengan berbagai indikator dari aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan sejumlah kebijakan komprehensif terkait permasalahan demokrasi di Indonesia.

Kebijakan ini termasuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan beragama melalui pembentukan kerangka hukum yang kuat, melawan diskriminasi melalui undang-undang dan tindakan afirmatif, meningkatkan integritas dan transparansi pemilu dengan pendidikan pemilih, mendukung upaya pelestarian dan regenerasi budaya melalui investasi dalam pendidikan budaya, dan mengelola kerusuhan sosial melalui jalur damai. Dengan langkah- langkah ini, diharapkan akan tercipta lingkungan demokrasi yang lebih inklusif dan stabil, membuka jalan bagi pertumbuhan nasional dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Sejalan uraian diatas maka penelitian ini mencoba menganalisis "pengaruh aspek-aspek demokrasi indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia periode 2016-2020".

Kajian Literatur

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno, (2006) pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu. Sehingga, pertumbuhan ekonomi menggambarkan sampai dimana perubahan perekonomian pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. *A nation's economic development is reflected in its economic growth, which is quantified by its growth rate* (Yolanda & Satrianto, 2019).

Menurut Todaro & Smith (2012) dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu: pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia; kedua, pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang; ketiga, kemajuan teknologi. Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Indeks Demokrasi Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.

Aspek Kebebasan Sipil

Pendefinisian aspek ini di dalam IDI dalam Achmad *et al.* (2020) merujuk pada Mr Beeley, ia menjelaskan bahwa konsep kebebasan sipil berkaitan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan bergerak dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa kebebasan sangat penting bagi demokrasi karena tanpa kebebasan masyarakat tidak mungkin dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah. Tetapi kebebasan mempunyai pengertian yang luas. IDI dalam hal ini mengacu pada konsep Beeley tentang unsur kebebasan sipil. 1) Kebebasan berpendapat (*freedom of Expression*), kebebasan pers (*freedom of press*), kebebasan berserikat (*freedom of assembly*), kebebasan beragama dan beribadah (*freedom of ibadah*). Oleh karena itu, definisi operasional yang digunakan IDI mengenai aspek ini adalah: Kebebasan individu/warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat dan keyakinannya, serta bebas dari diskriminasi dan pengekangan yang dilakukan oleh individu/warga negara lain (Badan Pusat Statistik, 2023). Meski begitu, IDI memberikan batasan definisi tersebut dengan menyatakan bahwa kebebasan sipil yang akan dilihat dibatasi hanya pada kekuasaan individu dan kelompok yang berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. kebebasan sipil juga menjadi faktor pendorong kehidupan ekonomi masyarakat semakin maju.

Selain itu, negara dalam pengertian IDI berarti pemerintah daerah, birokrasi pemerintah daerah, anggota DPRD, anggota DPRD dan MRP (khususnya di Papua), KPUD, dan kepolisian setempat (polda). Sedangkan kelompok masyarakat diartikan sebagai organisasi sosial yang berdasarkan agama, suku, ras, ruang lingkup pekerjaan, kesamaan tujuan kelompok, dan lain-lain. Variabel yang digunakan untuk merangkum

dimensi ini adalah: 1) Kebebasan berkumpul dan berserikat, 2) Kebebasan berekspresi, 3) Kebebasan beragama, dan 4) Kebebasan dari diskriminasi.

Aspek Hak-hak Politik

Dalam Penelitian Fajri *et al.* (2021) hak politik merupakan salah satu aspek demokrasi yang melibatkan partisipasi dan kompetisi. Dalam konteks IDI, hak politik direduksi menjadi dua variabel: 1) hak untuk memilih dan dipilih, dan 2) partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

Aspek Lembaga Demokrasi

Lembaga dalam konteks demokrasi dapat diartikan sebagai lembaga negara yang dibentuk dan berfungsi untuk menjamin terbentuknya dan berfungsinya sistem politik yang demokratis. Oleh karena itu, lembaga demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak hanya berarti “infrastruktur” seperti pemilu, namun juga “superstruktur” termasuk namun tidak terbatas pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilihan umum (pemilu), partai politik, media, dan kelompok kepentingan. Aspek IDI ini mempunyai (5 variabel). Yaitu: 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan adil, 2) peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 3) peran partai politik, 4) peran birokrasi pemerintah daerah dan 5) independensi peradilan (Fajri *et al.*, 2021).

Metode Penelitian

Untuk memperjelas pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 1
Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran
Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dalam miliar rupiah
Aspek kebebasan sipil	Indeks Kebebasan Sipil memiliki rentang nilai antara 1 sampai dengan 100, dengan 1 adalah nilai kebebasan sipil terendah sedangkan 100 adalah nilai kebebasan sipil tertinggi.
Aspek hak-hak politik	Indeks Hak Politik memiliki rentang nilai antara 1 sampai dengan 100, dengan 1 adalah nilai hak politik terendah sedangkan 100 adalah nilai Hak politik tertinggi.
Aspek kelembagaan demokrasi	Indeks Lembaga Demokrasi memiliki rentang nilai antara 1 sampai dengan 100, dengan 1 adalah nilai lembaga demokrasi terendah sedangkan 100 adalah nilai lembaga demokrasi tertinggi.

Sumber : Badan Pusat Statistik

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada teori dalam mengukur variabel penelitian melalui angka-angka dalam menganalisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan data panel dengan jenis data sekunder dari tahun 2016-2020 berdasarkan data yang tersedia di Badan Pusat Statistik.

Jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 170 observasi dengan populasi dan sampel seluruh Provinsi yang ada di Indonesia yang berjumlah 34 yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Dki Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu gabungan antara data *time series dan cross section*. Penggunaan regresi data panel dalam penelitian ini terdiri dari common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM) dengan model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PE = \alpha + \beta_1 KS + \beta_2 HHK + \beta_3 LD + \varepsilon \quad (1)$$

Dimana:

PE : Pertumbuhan Ekonomi

KS : Kebebasan Sipil

HHK : Hak-hak Politik

LD : Lembaga Demokrasi

a : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi

e: Standar Error

Pemilihan model data panel, secara umum akan berdampak pada kesulitan dalam spesifikasi model. Oleh karena itu Residual ada tiga macam, yaitu residual time series, cross section dan kombinasi keduanya. Terdapat beberapa metode dalam mengestimasi model regresi data panel antara lain *common effect model (CEM)*, *fixed effect model (FEM)* dan *random effect model (REM)* (Widarjono, 2005).

a. Uji Chow

H0: *Common Effect Model (CEM)*

H1: *Fixed Effect Model (FEM)*

b. Uji Hausman

H0: *Random Effect Model (REM)*

H1: *Fixed Effect Model (FEM)*

c. Uji Lagrange Multiplier

H0: *Common Effect Model (CEM)*

H1: *Random Effect Model (REM)*

Hasil model yang terpilih akan diuji dengan asumsi klasik untuk memberikan kepastian bahwa model tersebut memiliki kepastian estimasi, tidak bias, dan konsisten dengan hasil regresi data panel. Selain itu, model CEM dan FEM yang terpilih akan diuji heteroskedastisitas dan multikolinieritas, sedangkan model REM akan diuji multikolinieritas dan normalitasnya (Ekananda, 2014).

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil analisis Statistik Deskriptif

	Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	Pertumbuhan Ekonomi
Mean	83.43847	66.76594	73.03688	305478.9

Median	84.79500	66.72000	73.09000	131222.6
Maximum	100.0000	86.52000	93.98000	1836241
Minimum	51.01000	38.05000	49.79000	21556.68
Std. Dev.	9.870624	9.338472	10.34744	432540.1
Observations	170	170	170	170

Sumber : Olahan data Eviews 2023

Berdasarkan Tabel 2, variabel produk domestik bruto (PDB) regional memiliki nilai yang berkisar dari minimum 21556.68 hingga maksimum 1836241, menurut hasil analisis statistik deskriptif. Data tersebut tersebar dari nilai rata-rata ke tingkat yang ditunjukkan oleh standar deviasi 432540, yaitu 305478,9. Standar deviasi yang tinggi mengindikasikan bahwa sebagian kecil data cenderung mendekati nilai rata-rata, sehingga menghasilkan pola yang lebih tidak stabil. Indeks Kebebasan Sipil memiliki nilai rata-rata sebesar 83,44 dan standar deviasi sebesar 9,87, dengan nilai yang berkisar antara minimum 51,01 hingga maksimum 100. Karena nilai rata-rata Indeks Kebebasan Sipil lebih tinggi dari standar deviasi ($83,44 < 9,87$), maka dapat diasumsikan bahwa hasil yang kurang baik diindikasikan oleh indeks tersebut.

Indeks Hak-hak Politik memiliki nilai rata-rata 66,77 dan standar deviasi 9,34, dengan nilai berkisar dari minimum 38,05 hingga maksimum 86,52. Karena nilai rata-rata Indeks Hak-hak Politik lebih tinggi dari standar deviasi ($66,77 > 9,34$), maka dapat dikatakan bahwa indeks ini menunjukkan hasil yang baik. Nilai rata-rata Indeks Lembaga Demokrasi adalah 73,04, dengan standar deviasi 10,35, dan bergerak dari nilai minimum 49,79 hingga maksimum 93,98. Karena nilai rata-rata Indeks Lembaga Demokrasi ($73,04 > 10,35$) lebih tinggi dari standar deviasi, maka dapat dikatakan bahwa indeks ini menunjukkan hasil yang baik.

Regresi Data Panel

Setelah menyelesaikan uji asumsi klasik, kami menggunakan berbagai model, selain uji *Chow*, *Hausman*, dan *Lagrange Multiplier* (LM) yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menganalisis hasil regresi data panel. Model-model tersebut antara lain *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM).

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* Discussion dan *Common Effect Model* untuk regresi data panel.

Tabel 3
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	932.741921	(33,133)	0.0000
Cross-section Chi-square	926.261761	33	0.0000

Sumber : Olahan data Eviews 2023

Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model regresi dan H_0 ditolak ketika nilai probabilitas *cross-section* F dan *Chi-square* sebesar $0.0000 < 0.05$.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* untuk memutuskan model mana yang harus digunakan.

Tabel 4
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.788496	3	0.2852

Sumber : Olahan data Eviews 2023

Random Effect Model (REM) merupakan model regresi yang dipilih ketika nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar $0.2852 > 0.05$, dan H_0 dapat diterima.

Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk mengetahui apakah Random Effect Model memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Common Effect Model.

Tabel 5
Uji Lagrange Multiplier

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	317.4503 (0.0000)	2.050694 (0.1521)	319.5010 (0.0000)

Sumber : Olahan data Eviews 2023

Ketika nilai *Breusch-Pagan cross section* sebesar $0.000 < 0.05$, H_0 ditolak, yang mengindikasikan bahwa Random Effect Model (REM) merupakan model yang tepat untuk digunakan.

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen yang dimasukkan dalam penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 6
Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	101987.9	95692.85	1.065784	0.2881
Civil Liberties	246.7471	534.5588	0.461590	0.6450
Political Rights	701.4262	489.3278	1.433448	0.1536
Democratic Institutions	1863.050	323.3126	5.762380	0.0000

Sumber : Olahan data Eviews 2023

Analisis uji T kemudian terlihat sebagai berikut: (1) Karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,645 > 0,05$ dan nilai statistik T-tabel sebesar $0,461 < 1,654$, maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan sipil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan data faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. (2) Hak-hak politik tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasarkan nilai

statistik T-tabel sebesar $1,433 < 1,654$ dan nilai signifikan dari data yang dihitung sebesar $0,1536 > 0,05$. Dengan mempertimbangkan nilai statistik T-tabel sebesar $5,762 > 1,654$ dan nilai signifikan data yang dihitung sebesar $0,000 < 0,05$, maka perhitungan data untuk faktor-faktor yang disebutkan di atas mengindikasikan bahwa lembaga-lembaga demokrasi secara signifikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Koefisien Determinasi

Tabel 7
Koefisien Determinasi

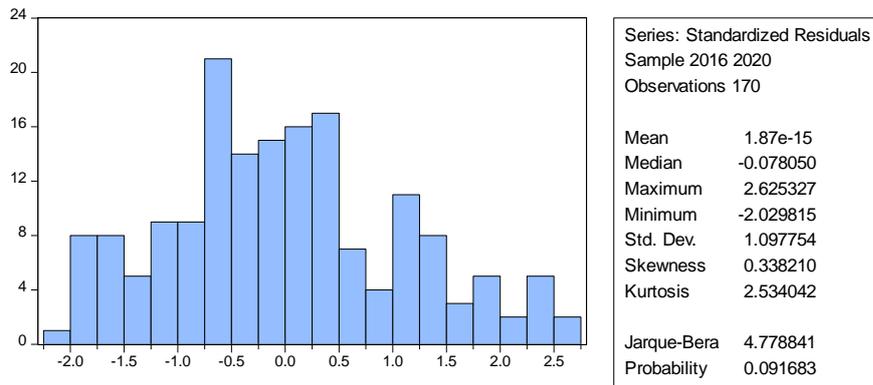
R-squared	0.179068	Mean dependent var	9746.728
Adjusted R-squared	0.164232	S.D. dependent var	33643.93

Sumber : Olahan data Eviews 2023

Tabel uji R2 menunjukkan bahwa variabel kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nilai adjusted R-squared dari variabel-variabel ini adalah 0,164, atau 16,4%. Variabel-variabel lain mempengaruhi 83,6%.

Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel independen dan dependen terdistribusi secara normal atau mencerminkan model regresi.



Sumber : Olahan data Eviews 2023

Gambar 2
Uji Normalitas

Grafik/tabel uji normalitas di atas menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal jika nilainya lebih besar dari nilai probabilitas $0,05 > 0,091683$, yaitu 0,091683.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8
Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.018696	-0.063221
X2	-0.018696	1.000000	0.250367
X3	-0.063221	0.250367	1.000000

Tabel di atas menjelaskan bahwa koefisien korelasi antara X1 dan X2 adalah 0,52, koefisien korelasi antara X1 dan X3 adalah -0,36, dan koefisien korelasi antara X2 dan X3 adalah 0,250. Batas yang secara umum diakui sebesar 0,85 sangat terlampaui oleh ketiga angka tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 tidak menunjukkan bukti yang meyakinkan adanya multikolinearitas. Sebagai hasilnya, temuan ini menunjukkan bahwa model tersebut lolos uji multikolinieritas dan tidak memiliki masalah multikolinieritas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji estimasi, *random effect model* menjelaskan bahwa H1 ditolak, yaitu kebebasan sipil tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan hipotesis dan teori yang sebelumnya diajukan oleh peneliti, di mana kebebasan sipil dianggap sebagai faktor pendorong kemajuan ekonomi masyarakat (Sari & Malik, 2022). Akan tetapi, pentingnya sistem hukum dan kelembagaan juga harus dipertimbangkan kebebasan sipil tidak akan memberikan dampak positif jika tidak diimbangi dengan sistem hukum yang efektif dan institusi yang berfungsi dengan baik. Lingkungan politik dan sosial yang bergejolak menciptakan ketidakpastian dan dapat menghambat keputusan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi juga dapat menjadi faktor yang merugikan. Kebebasan sipil yang tidak disertai dengan upaya serius untuk mengurangi korupsi dapat merusak institusi, menciptakan kesenjangan, dan menghambat investasi dan inovasi. Kesenjangan sosial juga perlu diperhatikan dimana kebebasan sipil yang tidak memperhitungkan kesenjangan sosial dapat menyebabkan kesenjangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Adib *et al.*, 2019). Hasil tersebut mengikut penelitian yang dilakukan oleh Yudanto & SBM, (2021) Kebebasan sipil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil uji estimasi, *random effect model* menjelaskan bahwa H2 ditolak, yaitu hak-hak politik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan hipotesis dan teori yang sebelumnya diajukan oleh peneliti, kebebasan politik memberikan lingkungan yang baik untuk menarik investor lokal dan luar negeri adalah kewajiban setiap pemerintah untuk memberikan lebih banyak hak politik kepada warganya dalam bentuk pemilihan umum yang bebas, tidak memihak, dan tidak diskriminatif. Perwakilan rakyat harus benar-benar memerintah dan majelis politik harus rasional dan kompeten dalam membuat undang-undang. Kebijakan-kebijakan ini akan memperkuat hak-hak politik dan demokrasi yang sesungguhnya. Harus ada kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, hak untuk bergabung dan membuat asosiasi pribadi. Pada saat yang sama pemerintah harus memberikan supremasi hukum dan kedaulatan pribadi kepada individu. Hal ini akan memperkuat hak-hak politik yang baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ahmed & Ahmad, 2020). Akan tetapi, meskipun hak-hak politik dapat menciptakan lingkungan yang demokratis, ketidakpastian politik yang tinggi, khususnya dalam konteks transisi politik atau konflik, dapat menghambat keputusan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investor mungkin enggan berinvestasi dalam kondisi politik yang tidak stabil. Hasil tersebut mengikut penelitian yang dilakukan oleh Mohammadi *et al.* (2023) hak-hak politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil uji estimasi, *random effect model* menjelaskan bahwa H3 diterima, yaitu lembaga demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan hipotesis dan

teori yang sebelumnya diajukan oleh peneliti, lembaga demokrasi dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Demokrasi mempunyai dampak positif baik terhadap politik maupun perekonomian. Lembaga demokrasi dirancang untuk mengawasi kekuasaan pemerintah dan membatasi tindakan pemerintah atau mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Salah satu manfaat demokrasi adalah menyingkirkan pemimpin yang buruk (Adib *et al.*, 2019). Menurut Todaro & Smith (2012) mengemukakan bahwa perekonomian yang lebih tidak stabil diketahui tumbuh lebih lambat daripada perekonomian yang stabil, efek positif demokrasi pada pertumbuhan dapat terlaksana melalui saluran ini. Namun, manfaat yang diperoleh dapat dinegosiasikan oleh efek negatif demokrasi pada pertumbuhan. Hasil tersebut mengikut penelitian yang dilakukan oleh Acemoglu *et al.* (2019) lembaga demokrasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan sipil tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebebasan sipil dianggap sebagai pendorong pembangunan ekonomi, namun dampaknya dilemahkan oleh ketidakpastian politik dan tingginya tingkat korupsi. Hak politik juga tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hak-hak politik diharapkan dapat menciptakan lingkungan demokratis yang mendorong pertumbuhan, namun ketidakpastian politik, terutama dalam situasi transisi dan konflik, dapat menciptakan hambatan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun lembaga demokrasi terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lembaga-lembaga ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perannya sebagai pengawas kekuasaan pemerintah. Meskipun demokrasi mempunyai dampak positif, penting untuk dicatat bahwa kondisi sosial, ketidakpastian politik, dan tingkat korupsi juga memainkan peran penting ketika menilai dampak lembaga-lembaga demokrasi.

Referensi

- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy Does Cause Growth Suresh Naidu Pascual Restrepo. *Journal of Political Economy*, 127(1), 47–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/700936>
- Achmad, Z. A., Siswati, E., & Wahyudi, A. (2020). *Data Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2018* (Issue August 2020). https://www.researchgate.net/publication/343529717_DATA_INDEKS_DEMOKRASI_INDONESIA_IDI_DI_KOTA_BLITAR_TAHUN_2018
- Adib, Idris, & Triani, M. (2019). Analisis Pengaruh Demokrasi , Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Adib , Idris , Mike Triani Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan bahw. *Jurnal Ecosains*, 8(1), 67–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/ecosains.11519657.00>
- Ahmed, S., & Ahmad, H. K. (2020). Impact of Economic and Political Freedom on Economic Growth in Asian Economies. *European Online Journal of Natural and Social Sciences*, 9(1), 219–231. <https://european-science.com/eojnss/article/view/5986#:~:text=Economic freedom has positive and,FDI are positive and considerable.>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek*. <https://www.bps.go.id/subject/34/politik-dan-keamanan.html#subjekViewTab1>
- Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. (2014). Pngaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 3(3), 106–114. <https://doi.org/https://www.neliti.com/publications/44443/pengaruh-komponen-indeks-pembangunan-manusia-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-provin>
- Ekananda, M. (2014). *Analisis Ekonometrika Data Panel: Bagi Penelitian Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Edisi Asli). Mitra Wacana Media.
- Fajri, H., Wahyuni, N., Saputra, B., & Maani, K. D. (2021). Demokrasi Pincang: Analisis Terhadap Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat Pasca Reformasi. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(1), 108. <https://doi.org/10.24014/jel.v12i1.13303>
- Fatah, F. ., Othman, A., & Abdullah, S. (2012). Economic Growth, Political Freedom and Human Development: China, Indonesia, and Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 3, 291–299. <https://www.semanticscholar.org/paper/Economic-Growth%2C-Political-Freedom-and-Human-China%2C-Fatah-Othman/7b587a875619380ac0a48e48df29e5aeab67175c>
- Mas'ud, R., Wijaya, A., & Suharto, R. B. (2022). Pengaruh demokrasi ekonomi dan derajat penghisapan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di daerah penghasil sumber daya alam dan daerah non sumber daya alam di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 24(1), 111–123. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10395>
- Mohammadi, H., Shayanmehr, S., & Borrero, J. D. (2023). Does Freedom Matter for Sustainable Economic Development? New Evidence from Spatial Econometric Analysis. *Mathematics*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/math11010145>
- Mulyadi, S. (2023). Pengaruh Korupsi Dan Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perspektif Islam. *AL-QASHDU: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 69–83. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.46339/al-qashdu.v3i1.905>
- Sari, V. K., & Malik. (2022). The Relationship between Fiscal Policy and Civil Liberty on Per capita GDP in Indonesia during 1980-2018. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JEKT.2022.v15.i01.p02>
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi pembangunan : proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Kencana.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development. In *Pearson*. <http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/57304a77-1269-4081-bd5b-4c66b84b06a4.pdf>
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika : teori dan aplikasi untuk ekonomi dan bisnis* (edisi 1). Ekonisia.
- Yolanda, & Satrianto, A. (2019). Pengaruh Korupsi, Demokrasi Dan Politik Terhadap Kemiskinan Di Delapan Negara Asean Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 845–854. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7711>
- Yudanto, R., & SBM, N. (2021). Analisis Hubungan Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak-Hak Politik, Indeks Lembaga Demokrasi, Dan Indeks Gini Dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 – 2019. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 91. <https://doi.org/10.31002/kalacakra.v2i2.4378>
- Zainuddin, Bakri, M., & Mufadhhal, M. F. (2023). Analisis Kausalitas Kebebasan Sipil dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 164–172. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.825>
- Zouhaier, H. (2012). Institutions, Investment and Economic Growth. *International Journal of Economics and Finance*, 4(2), 152–162. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v4n2p152>